

ANALISIS KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA

JURNAL



Dosen Pembimbing:

Drs. Agus Widarjono S.E.,M.A.,Ph.D

Oleh

Nama :Nurviana Purnama Anandanisa

NIM : 14313296

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

2018

Analisis Kemiskinan di Provinsi Papua

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua. Dengan periode tahun 2011-2015 sebanyak 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan menggunakan data panel (pooled data) dengan alat analisis Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negative tetapi tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua.

Kata Kunci: PDRB, IPM, Pengeluaran Pemerintah dan Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang pelik dan kompleks yang sangat banyak dialami diberbagai Negara dan daerah. Apalagi jika suatau Negara atau daerah tersebut memiliki jumlah penduduk yang tinggi dan memiliki keterbatasan kualitas sumber daya manusianya. Kemiskinan juga bukan hanya menimbulkan masalah sosial tetapi juga menimbulkan masalah dalam pembangunan ekonomi. Mengatasi masalah kemiskinan ini merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan ekonomi. Istilah kemiskinan ini muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebtuhan hidup seperti kebutuhn primer dan sekunder serta kurangnya hasil pendapatan yang diperoleh sehingga jauh dari kata sejahtera atau makmur. Hal itu dikarenakan rendahnya kualitas pengembangan manusia sehingga diperlukan pengeluaran pemerintah disektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Apabila seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka seseorang itu memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang tinggi pula. Serta perlunya pengeluaran pemerintah disektor kesehatan melalui pelayan-pelayan kesehatan yang memadai. Sehingga dapat menodorong untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan produktivitas yang meningkat serta pendapatan yang tinggi.

Dengan pendapatan yang tinggi akan meningkatkan daya beli sehingga dapat mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Dan seiring berjalannya waktu tingkat kemiskinan akan berangsur-angsur menurun. Dari faktor – faktor tersebut inilah yang dialami di Provinsi Papua. Di Provinsi Papua masih kurangnya kualitas dan jumlah saran serta prasarana, kurangnya pengembangan

manusia, rendahnya keterampilan dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua masih tinggi. Tetapi seiring berjalannya waktu, semakin lama kemiskinan di Papua mengalami penurunan. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua sebanyak 914.87 ribu jiwa atau sebesar 28.40 persen. Yang kemudian di tahun 2017 menurun menjadi 910.42 ribu jiwa atau sebesar 27.76 persen. Meskipun data kemiskinan di Provinsi Papua menunjukkan penurunan tetapi Provinsi Papua masih merupakan provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Maka program-program kemiskinan dan perhatian lebih dari pemerintah masih sangat diperlukan di Provinsi Papua dalam mengatasi masalah-masalah kemiskinan agar semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin.

KAJIAN PUSTAKA

Susanti Sussy (2013) menganalisis mengenai Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. Analisis permasalahan ini menggunakan analisis data panel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar PDRB, IPM dan pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan PDRB, IPM dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2009 – 2011.

Wahyudi Dicky, Tri Wahyu Rejekingsih (2013) menganalisis kemiskinan di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang

memiliki persentase tingkat kemiskinan absolut paling tinggi se-pulau Jawa dalam beberapa tahun belakangan ini. Hasil penelitian menunjukkan variabel pendidikan, kesehatan, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

Amalia Rahmah, Madris dan Abd.Rahman Razak (2015) menganalisis mengenai Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat menggunakan objek penelitian meliputi pengeluaran pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah kabupaten secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tetapi tidak secara langsung, tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Pengeluaran pemerintah provinsi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Pengeluaran pemerintah pusat terhadap kemiskinan secara langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Tetapi secara tidak langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat.

Tonapa Tierzha, Ida Ayu Purba Riani dan Elisabeth Lenny Marit (2015) menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Jayapura tahun 2004-2013. Hasil penelitian menunjukkan pendidikan (melek huruf) berpengaruh signifikan dan berpengaruh dominan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jayapura. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jayapura. Karena masih kurangnya peningkatan kapasitas lahan pertanian, penyediaan pupuk dan bibit ikan serta teknologi yang kurang memadai.

LANDASAN TEORI

Kemiskinan merupakan keadaan dimana ketika seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonominya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Kemiskinan itu bersifat multidimensional yang memiliki arti karena manusia memiliki banyak kebutuhan dan bermacam-macam sehingga kemiskinan mempunyai berbagai macam aspek yaitu aspek primer yang terdiri dari asset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan (Arsyad, 2004). Sedangkan aspek sekunder meliputi jaringan sosial, keuangan dan informasi. Menurut Mudrajat Kuncoro (2006), Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Masalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup ini meliputi pendapatan yang diperoleh rendah, rumah yang kurang layak untuk ditempati, tingkat pendidikan yang rendah sehingga banyak sumber daya manusianya rendah, pelayanan kesehatan yang kurang memadai serta tingginya tingkat pengangguran karena kurangnya lapangan kerja yang sesuai dengan kerampilan atau karena kurangnya keterampilan sehingga rendahnya minat perusahaan untuk menerima tenaga kerja tersebut.

Dari beberapa pengertian tersebut, kemiskinan memiliki dua bentuk ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kemiskinan yaitu yang pertama kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang diukur dengan membandingkan

tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Konsep kemiskinan absolut ini untuk menunjukkan tingkat pendapatan minimum spesifik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar agar dapat bertahan hidup. Kebutuhan fisik dasar tersebut meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Garis kemiskinan absolut tidak mengenal batas Negara, tidak terpengaruh oleh tingkat pendapatan per kapita nasional dan memperhitungkan tingkat harga yang berbeda-beda dengan cara mengukur kemiskinan sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari \$1,25 per hari atau \$2 per hari dalam perhitungan dollar PPP (Todaro, 2011). Dan yang kedua, Kemiskinan Relatif merupakan kemiskinan yang melihat dari aspek ketimpangan sosial. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dikategorikan selalu miskin. Kemiskinan relatif merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolut.

Karena menurut konsep kemiskinan ini orang yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi dan bisa memenuhi kebutuhan dasarnya belum tentu tidak bisa dikatakan tidak miskin. Sehingga dari hal itu dapat dilihat jika kemiskinan relatif sangat erat hubungannya dengan tingkat pendapatan. indikator kemiskinan yaitu meliputi tingkat konsumsi beras perkapita pertahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), dan tingkat kesejahteraan (Subandi, 2016). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis kemiskinan merupakan ukuran yang

digunakan untuk menyatakan besarnya pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum sehingga ukuran tersebut dapat digunakan untuk menyatakan apakah seseorang tersebut miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan yang digunakan di tiap-tiap tempat berbeda, tidak terpengaruh oleh tingkat pendapatan per kapita nasional sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Garis kemiskinan ditentukan pada tingkat yang tetap atau konstan secara riil sehingga dapat memetakan kemajuan yang diperoleh pada tingkat absolut dari waktu ke waktu (Todaro, 2011).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah pada periode waktu tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur nilai pertumbuhan disuatu daerah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Hal tersebut yang menyebabkan besaran nilai PDRB di masing-masing daerah bervariasi. Ada dua bentuk cara penyajian data PDRB yaitu Produk Domestik Regional Bruto menurut harga konstan merupakan jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang diitung menurut harga tetap.

Dari perhitungan ini dapat dilihat tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas

harga berlaku merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula, dan sebaliknya apabila besaran nilai PDRB kecil maka hal itu menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang kecil atau rendah pula.

Pembangunan manusia dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga menambah ilmu pengetahuan, keterampilan dan produktivitas. Menurut konsepnya, pembangunan manusia merupakan salah satu upaya untuk memperluas peluang penduduk agar dapat mencapai hidup layak dengan meningkatkan kapasitas dasar (produktivitas) dan daya beli. Maka untuk mengukur kualitas hidup manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu Negara, yang mengkombinasi pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan (Todaro, 2011).

The United Nations Development Program (UNDP) menyusun ukuran untuk dapat melihat kesejahteraannya yaitu Human Development Indeks atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks tersebut disusun atas tiga indikator yaitu; angka harapan hidup (*life expectancy at age 0 = e0*), angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate = Lit*), rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling = MYS*), dan *Purchasing Power Parity* (ukuran pendapatan yang sudah disesuaikan dengan paritas daya beli). IPM menggambarkan beberapa

komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah Indeks Pembangunan Manusia bukan hanya digunakan untuk mengukur tingginya tingkat pendapatan semata tetapi melihat dari sisi pendidikan dan kesehatan. Karena pendidikan dan kesehatan merupakan modal manusia yang penting juga. Apabila pendapatan tinggi tetapi pendidikan yang rendah dan mengalami kesehatan maka dapat dikatakan pembangunan manusianya rendah. Yang paling penting adalah pilihan untuk berumur panjang dan sehat, mendapat pendidikan yang cukup dan menikmati standar kehidupan yang layak.

Pengeluaran pemerintah meliputi pengeluaran barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah langsung mendapat balas jasanya. Pengeluaran pemerintah atau government purchases meliputi upah pegawai negeri dan pengeluaran untuk pekerja umum. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membayar administrasi pemerintahan dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan guna meningkatkan pengeluaran agregat dan menaikkan tingkat kegiatan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan anggaran untuk membantu dalam mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia sehingga dapat mengatasi kemiskinan. Jumlah pengeluaran pemerintah tergantung dari berbagai faktor misalnya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Menurut Sukirno (2012), perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi suatu negara.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Data Panel (Pooled Data). Pada data Time Series digunakan untuk melihat perubahan waktu selama lima tahun yaitu dalam periode tahun 2011-2015 dan data Cross Section digunakan untuk melihat perbedaan dari variabel antar 29 Kabupaten/Kota di Papua. Sehingga didapat hasil observasi sebanyak 145 data. Penelitian ini menggunakan data panel atau panel pooled data dengan alat bantu analisis yaitu *eviews 8*. Estimasi model yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan OLS (*OrdinaryLeast Squares*). Kemudian evaluasi regresinya yaitu meliputi Keباikan Garis Regresi, Uji Keباikan Model dan Uji Signifikansi. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kemiskinan di Kabupaten/Kota Papua dan variabel independen dalam penelitian ini yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Persamaan model data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Dimana:

Y = Tingkat Kemiskinan

X₁ = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (dalam satuan miliar rupiah)

X₂ = Belanja Pemerintah (dalam satuan juta rupiah)

X₃ = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (dalam satuan persen)

β = Nilai Koefisien Variabel

β₀ = Intercept

$i = 1,2,3, \dots, 29$ (Data Cross Section Kabupaten di Papua)

$t = 1,2,3,4,5$ (Data Time Series tahun 2011-2015)

$e = \text{Error}$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model antara *Fixed Effect Model* dengan *Common Effect Model*

Untuk memilih model manakah yang baik antara *model fixed effect* dan *model common effect* maka akan digunakan atau dilakukan *Uji Chow*.

Tabel 4.1

Hasil regresi antara *fixed effect model* dengan *common effect model*

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: FIXED

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	419.514042	(28,113)	0.0000
Cross-section Chi-square	674.755715	28	0.0000

Dari hasil *Uji Chow* tersebut, diperoleh nilai statistik *cross section F* sebesar 419.514042 dan nilai statistik *cross section chi square* sebesar 674.755715. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai statistik *cross section F* lebih kecil dibandingkan dengan nilai statistik *cross section chi square* maka hal itu menunjukkan menolak H_0 dan menerima H_a . Artinya dalam *Uji Chow*, *fixed effect model* yang lebih baik digunakan dibandingkan dengan *common effect model*.

Pemilihan Model antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*

Untuk dapat mengetahui mana model yang baik antara *fixed effect model* dengan *random effect model* maka dilakukan *Uji Hausman*.

Tabel 4.2

Hasil regresi antara *fixed effect model* dengan *random effect model*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: RANDOM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.764568	3	0.0005

Dari hasil *Uji Hausman* diperoleh nilai statistik *cross section random* sebesar 17.764568. Jika dibandingkan dengan nilai *cross section chi square* sebesar 674.755715 maka nilai *cross section random* lebih kecil dibandingkan dengan nilai statistik *cross section chi square*. Sehingga dapat dikatakan bahwa menolak H_0 dan menerima H_a . Artinya *fixed effect model* yang lebih baik digunakan dibandingkan dengan *random effect model*.

Hasil Fixed Effect Model

Tabel 4.3

Hasil regresi Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG(Y?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 12/21/17 Time: 21:35
 Sample: 2011 2015
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 29
 Total pool (balanced) observations: 145

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.042341	0.323385	15.59238	0.0000
LOG(X1?)	-0.210358	0.072347	-2.907633	0.0044
LOG(X2?)	-0.015929	0.028240	-0.564069	0.5738
X3?	-0.000977	0.009509	-0.102695	0.9184
Fixed Effects (Cross)				
_ASMAT—C	-0.037899	_MAPPI—C	-0.036960	
_BIAKNUMFOR—C	0.596506	_MARAUKE—C	0.326361	
_BOVENDIGOEL—C	-0.541243	_MIMIKA—C	1.144689	
_DEYAI—C	-0.024535	_NABIRE—C	0.663613	
_DOGIYAI—C	-0.133128	_NDUGA—C	0.021555	
_INTANJAYA—C	-0.579963	_PANIAI—C	0.957674	
_JAYAPURA—C	0.034991	_PEGUNUNGANBINTANG--C	-0.144862	
_JAYAWIJAYA—C	1.335794	_PUNCAK—C	0.228825	
_KEEROM—C	-0.885871	_PUNCAKJAYA—C	0.370987	
_KEPYAPEN—C	0.090221	_SARMI—C	-1.500174	
_KOTAJAYAPURA—C	0.953275	_SUPIORI—C	-1.495507	
_LANNYJAYA—C	0.823973	_TOLIKARA—C	0.448996	
_MAMBERAMORAYA—C	-1.521146	_WAROPEN—C	-1.083746	
_MAMBERAMOTENGAH—C	-0.589636	_YAHUKIMO—C	0.984614	
		_YALIMO—C	-0.407402	

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.993330	Mean dependent var	3.236467
Adjusted R-squared	0.991500	S.D. dependent var	0.702460
S.E. of regression	0.064764	Akaike info criterion	-2.444103
Sum squared resid	0.473963	Schwarz criterion	-1.787168
Log likelihood	209.1975	Hannan-Quinn criter.	-2.177168
F-statistic	542.8393	Durbin-Watson stat	2.004250
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Statistik *Regresi Fixed Effect Model*

Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil tabel diatas, diperoleh nilai R^2 sebesar 0.993330 atau 99.33% yang artinya variasi variabel independen (PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan IPM) mempengaruhi variabel dependen (Kemiskinan). Sedangkan sisanya sebesar 0.67% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Dari hasil tabel diatas didapatkan nilai F statistik sebesar 542.8393 dengan nilai $N_1 = 3$ dan nilai $N_2 = 141$. Sehingga dapat diperoleh F tabel sebesar 2.67 dengan alfa 5% atau 0.05. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai F statistik lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabelnya maka menolak H_0 dan menerima H_a . Artinya variabel independen (PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan IPM) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kemiskinan).

Uji Signifikansi (Uji T)

Pada variabel X_1 atau PDRB diperoleh nilai t statistik sebesar 2.907633 dan t tabel sebesar 2.35309 dengan alfa 1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel maka menolak H_0 . Artinya variabel independen (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kemiskinan).

Pada variabel X_2 atau Belanja Pemerintah diperoleh nilai t statistik sebesar 0.564096 dan t tabel 1.28758 dengan alfa 10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t statistik lebih kecil dibandingkan dengan nilai t tabel maka menolak

Ha. Artinya variabel independen (Pengeluaran Pemerintah) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kemiskinan).

Kemudian, pada variabel X3 atau IPM diperoleh hasil t statistik sebesar 0.102695 dan t tabel sebesar 1.28758 dengan alfa 10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t statistik lebih kecil dibandingkan dengan nilai t tabel maka menolak Ha. Artinya variabel independen (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kemiskinan).

Intersep Pembeda Cross Section

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemiskinan yang ada di tiap kabupaten/kota di Provinsi Papua. Berikut adalah hasil intersep tersebut:

Kabupaten/Kota	Konstanta	Koefisien	Intersep
Asmat	-0.037899	5.042341	5.004442
Boven Digoel	-0.541243	5.042341	4.501098
Biak Numfor	0.596506	5.042341	5.638847
Dogiyai	-0.133128	5.042341	4.909213
Deiyai	-0.024535	5.042341	5.017806
Intan Jaya	-0.579963	5.042341	4.462378
Jayapura	0.034991	5.042341	5.00735
Jayawijaya	1.335794	5.042341	6.378135
Kota Jayapura	0.953275	5.042341	5.995616
Keerom	-0.885871	5.042341	4.15647
Kepulauan Yapen	0.090221	5.042341	5.132562
Lanny jaya	0.823973	5.042341	5.866314
Mimika	1.144689	5.042341	6.18703
Mappi	-0.036960	5.042341	5.005381
Mamberamo Raya	-1.521146	5.042341	3.521195
Merauke	0.326361	5.042341	5.368702
Mamberamo Tengah	-0.589636	5.042341	4.452705
Nabire	0.663613	5.042341	5.705954
Nduga	0.021555	5.042341	5.063896

Kabupaten/Kota	Konstanta	Koefisien	Intersep
Paniai	0.957674	5.042341	6.000015
Pegunungan Bintang	-0.144862	5.042341	4.897479
Puncak Jaya	0.370987	5.042341	5.413328
Puncak	0.228825	5.042341	5.271166
Supiori	-1.495507	5.042341	3.546834
Sarmi	-1.500174	5.042341	3.542167
Tolikara	0.448996	5.042341	5.491337
Waropen	-1.083746	5.042341	3.958595
Yahukimo	0.984614	5.042341	6.026955
Yalimo	-0.407402	5.042341	4.634439

Hasil penelitian menunjukkan lima kabupaten/kota di Provinsi Papua yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2011-2015 yaitu Jayawijaya sebesar 6.378135, Mimika sebesar 6.18703, Yahukimo sebesar 6.026955, Paniai sebesar 6.000015 dan Kota Jayapura sebesar 5.995616. Sedangkan lima kabupaten/kota di Provinsi Papua yang memiliki tingkat kemiskinan terendah pada tahun 2011-2015 yaitu Keerom sebesar 4.15647, Waropen sebesar 3.958595, Supiori sebesar 3.546834, Sarmi sebesar 3.542167 dan terakhir Mamberamo Raya sebesar 3.521195.

Interpretasi Hasil Regresi

Model persamaan regresi :

$$\text{LOG}(Y) = 5.042341 - 0.210358\text{LOG}X_1 - 0.015929\text{LOG}X_2 - 0.000977X_3$$

Dari hasil uji yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel X1 atau PDRB memiliki slope negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien variabel X1 sebesar -0.210358 yang berarti apabila nilai PDRB naik sebesar 1 persen maka akan menurunkan kemiskinan sebesar

0.210358 persen. Hal itu menunjukkan PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga.

Dari hasil uji yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel X2 atau Pengeluaran Pemerintah memiliki slope negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya yang merata, menjaga kestabilan ekonomi dan untuk mendistribusikan pendapatan yang merata. Tidak hanya itu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan juga dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Apabila pendidikan dan kesehatan murah atau memadai maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Dari hasil uji yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel X3 atau Indeks Pembangunan Manusia memiliki slope negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Hal ini dikarenakan di Papua masih kurangnya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Sehingga kualitas sumber daya manusianya sangat rendah. Sebenarnya banyak sumber daya manusia di Papua tetapi peningkatan kualitas yang masih kurang. Sehingga di Papua untuk mengentaskan kemiskinan, IPM masih kurang berpengaruh karena keterbatasannya atau kurang meratanya pelayanan sosial. Karena kurangnya jumlah dan kualitas sarana prasana serta rendahnya keterampilan dan pengetahuan sehingga menyebabkan masyarakat Papua mengalami keterbelakangan dan kesenjangan wilayah. Maka dari itu diperlukannya peningkatan pengembangan manusia melalui pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan gizi agar dapat

memperbaiki kesejahteraan masyarakat serta untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat dibuat kesimpulan dan implikasi sebagai berikut;

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki slope negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti apabila PDRB di Kabupaten/Kota provinsi Papua meningkat maka akan menurunkan kemiskinan. Dapat dilihat kemiskinan di Papua dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Berarti PDRB memiliki pengaruh yang besar terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Papua.
2. Pengeluaran Pemerintah memiliki slope negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Berarti pengeluaran pemerintah di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua belum seluruhnya merata. Karena sarana dan prasarana yang kurang memadai juga akan menyulitkan dalam pendistribusian bantuan seperti pendidikan, kesehatan dan bantuan lainnya sehingga kurang efektif.
3. Indeks Pembangunan manusia memiliki slope negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Papua. Hal ini dikarenakan di Papua masih kurangnya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Sehingga kualitas sumber daya manusianya sangat rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Feriyanto, Nur. 2014. *Ekonomi sumber Daya Manusia (Dalam Perspektif Indonesia)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hakim, Abdul. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan)*. Ed 4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mankiw, N, Gregory. Euston Quah & Peter Wilson. 2012. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subandi. 2016. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2012. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Susanti, Sussy. 2013. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*. Vol 9(1), pp 1-18
- Todaro, Michael, P & Stephen C Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Ed 11. Pnrjm Agus Dharma. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael, P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Ed 7. Jakarta: Erlangga.
- Tonapa, Tierzha, A, N. Ida, Ayu, P, R. & Elisabeth, Lenny, M. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kota Jayapura

Tahun 2004-2013. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol 2(3), 55-66.

Wahyudi, Dicky & Tri, W, Rejekingsih. 2013. Analisis Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Journal of Economics*. Vol 2(1), pp 1-15.

Widarjono, Agus. 2013. *Ekonomi Mitrika (Pengantar dan Aplikasi Disertai Panduan EViews)*. Ed 4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.